

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tingginya jumlah perusahaan yang *go public* berimplikasi pada keperluan akan informasi keuangan yang semakin tinggi. Kemanfaatan dari informasi keuangan menjadi keharusan bagi para penggunanya. Informasi dari laporan keuangan dianggap memiliki nilai kemanfaatan apabila dalam penyajiannya dilakukan dengan tepat waktu dan akurat, yaitu dapat tersedia ketika para pengguna laporan keuangan membutuhkannya. Inilah yang menjadi faktor penting bagi pemanfaatan laporan keuangan menurut (Prabasari and Merkusiwaty, 2017).

Laporan keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan terutama perusahaan yang sudah *go public*. Laporan keuangan adalah ringkasan proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Salah satu kewajiban perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (Soemargani and Mustikawati, 2015).

Perusahaan yang *go public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada OJK dengan batas paling lambat empat (4) bulan setelah tahun buku berakhir. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Perhitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir penyampaian laporan tahunan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka perusahaan harus secara sadar untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu agar terhindar dari sanksi administratif (Lestari and Latrini, 2018)

Fenomena yang berkaitan dengan *audit delay* yaitu pada perusahaan tambang batubara milik Group Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang di

kutip dari artikel CNN Indonesia menyatakan belum bisa mengeluarkan laporan keuangan tahunan 2014 karena perseroan masih berjibaku dengan penghitungan utang (cnnindonesia.com tanggal 8 april 2015). Untuk itu perusahaan akan menggunakan jasa auditor Independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangannya. Auditor harusnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SPAP tahun 2001 yang di tetapkan IAI. Kegiatan pemeriksaan ini akan membutuhkan waktu yang relatif lama karena auditor harus melakukan berbagai prosedur audit untuk mengumpulkan bukti bukti yang mendukung opini yang akan di berikan.

Pengauditan yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan waktu yang lebih lama dengan begitu berakibat *audit delay* yang panjang. Perusahaan yang mengalami *audit delay* yang panjang tidak hanya merugikan berbagai pihak. Bagi perusahaan, *audit delay* yang melebihi waktu publikasi laporan keuangan akan mengakibatkan citra perusahaan menjadi kurang baik dimata investor, sedangkan bagi investor, keadaan ini akan membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan investasi pada perusahaan yang terlambat mempublikasikan laporan keuangannya. Bagi eksternal auditor, perusahaan yang mengalami *audit delay* yang panjang ada kemungkinan mengganti auditor tersebut dengan auditor yang lain dengan harapan perusahaan tidak mengalami hal yang sama.

Salah satu variabel yang berpengaruh pada *audit delay* adalah profitabilitas, dimana profitabilitas menjadi salah satu ukuran keberhasilan kerja perusahaan dalam pencapaian laba. Fenomena yang berkaitan dengan profitabilitas yaitu pada PT. Century Textile Industry Tbk, perusahaan yang bergerak pada subsektor tekstil dan garment ini pun mengalami kerugian di tahun 2010, 2012, 2013. Meskipun di tahun 2011 dan 2014 perusahaan memperoleh laba, namun kejadian tersebut berarti perusahaan telah mengalami kerugian berturut-turut. Dengan mengalami kerugian berturut-turut, profitabilitas perusahaan dapat dikatakan buruk dan perusahaan telah mengalami trend negatif (Dewi dan Sri, 2015).

Ukuran Perusahaan merupakan salah satu variabel yang menyebabkan *audit delay* yang panjang. Hal ini didasari dengan asumsi bahwa perusahaan yang besar akan lebih kompleks sehingga auditor harus mengambil sampel yang lebih banyak

sehingga akan membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh bukti yang mendukung pendapat yang akan ia berikan. Fenomena yang berkaitan dengan ukuran perusahaan yaitu pada perusahaan Pelindo, dimana Pemerintah perlu menyiapkan seperangkat regulasi dan aturan main jika ingin membentuk sebuah holding atau korporasi induk yang akan menaungi bisnis kepelabuhan di tanah air. Rencana pembentukan Pelindo Incorporated juga tidak boleh mematikan keunggulan dan kreativitas masing-masing entitas, yakni Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV. Jika dilihat dari sisi kinerja, baik profesional maupun keuangan, lanjut Son Damar, Pelindo II (IPC) layak menjadi induk untuk Pelindo Incorporated. Selain dekat dengan pusat pemerintah, Pelindo II menaungi Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya mengatakan “kita sekarang hidup di abad global, persaingan ini di era semakin sengit, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kapasitasnya untuk mengelola dan mensinergikan sumberdaya pemerintah yang tersebar”(tribunnews.com tanggal 4 maret 2019).

Riset ini juga melakukan penambahan variabel yaitu komite audit sebagai variabel independen. Komite audit bertugas memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Fenomena yang berkaitan dengan komite audit yaitu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat berat pengangkut kontainer (*quay container crane*) di PT Pelindo II. Dalam kasus ini penyidik KPK memanggil Ketua Komite Audit Dewan Komisaris PT Pelindo II, Si Putu Ardana, dia akan di periksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Ricard Joost Lino atau RJ Lino. Dalam kasus ini, RJ Lino diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan alat tersebut. Lino disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Sindonews.com).

Penelitian ini dilakukan berdasarkan teori agensi dan teori kepatuhan. Teori agensi yaitu adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan

manajer (*agent*) yang bertugas untuk mengelola, menggunakan dan mengendalikan sumber daya menurut Jensen dan Meckling dalam (Prabasari and Merkusiwaty, 2017). Kaitanya dengan *audit delay*, Maharani (2013) menerangkan bahwasanya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke publik diharapkan mampu menurunkan potensi asimetri informasi yang muncul antara perusahaan dengan pihak pemakai laporan keuangan, dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akan menurunkan potensi kecurangan dari agent sebagai pihak yang mempunyai lebih banyak informasi dari pada principal untuk memanipulasi informasi manajemen atau keuangan untuk kepentingan pribadinya. Pemilik perusahaan memerlukan jasa auditor independen dalam melakukan verifikasi informasi yang disajikan oleh manajemen. Manajemen juga membutuhkan peran auditor untuk melegitimasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh manajemen (berbentuk laporan keuangan sehingga manajemen dinilai layak untuk mendapatkan insentif atas pekerjaan tersebut. Kreditor juga menjadi pihak yang membutuhkan auditor untuk memberi keyakinan bahwa uang yang mereka berikan untuk pembiayaan operasional perusahaan memang di belanjakan sesuai dengan persetujuan sebelumnya, sehingga kreditor akan mendapat penerimaan bunga atas pinjaman.

Dari informasi diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : **‘Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Komite Audit Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2018)**

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas Perusahaan terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah terdapat pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Delay*?
4. Apakah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Komite Audit terhadap *Audit Delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas perusahaan terhadap *Audit Delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Komite Audit terhadap *Audit Delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi *audit delay* pada Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sebagai pemenuh persyaratan akademik guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

2. Bagi Mahasiswa / Mahasiswi Jurusan Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai audit dan Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay.

4. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan referensi dalam melakukan perencanaan audit yang lebih baik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*.